



**J**URNAL  
PENELITIAN  
POS DAN  
INFORMATIKA

VOL 4. No. 2 Desember 2014



---

**SUSUNAN REDAKSI**

SK Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi Dan Informatika  
**Nomor : 57B/KEP/KOMINFO/BLSDM-1/5/2014**

**PENGARAH**

Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

**PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Ir. Hedi M. Idris, M.Sc  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika

**PENYUNTING**

Dr. Ramon Kaban, M.Si. (Komunikasi Politik – Kementerian Kominfo)  
Dr. Ashwin Sasongko (Komunikasi dan Opini Publik - LIPI)  
Drs. Sumarsono, M.Si (Media dan Komunikasi – Kementerian Kominfo)  
Dr. I Nyoman Adhiarna (Manajemen Teknologi Informasi – Kementerian Kominfo)  
Somo Arifianto, SE, M.A (Media dan Komunikasi – Kementerian Kominfo)

**MITRA BESTARI / PEER REVIEWER :**

Dr. Yan Rianto (Teknologi Informasi – LIPI)  
Sutoro, SE, MM (Manajemen Logistik Pos – Asperindo)  
Dr. Suwandi Sumartias, M.Si (Komunikasi - Universitas Padjadjaran)  
Dra. Siti Meiningsih, M.Sc (Informatika – Kementerian Kominfo)  
Dra. Tulus Subarjono (Komunikasi – Kementerian Kominfo)  
Dr. Ir. Endroyono, DEA (Telekomunikasi Multimedia – Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

**REDAKTUR PELAKSANA :**

Diah Arum Maharani, SE, MM  
Yane Marentek, SS  
Reza Bastanta Sitepu, S.Si.

**SEKRETARIAT REDAKSI**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika  
Badan Litbang SDM Kemkominfo  
Kementerian Komunikasi dan informatika  
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9 Gedung B Lt. 4 Jakarta 10110  
Telp/Fax : 021- 3846189

---

**Jurnal Penelitian Pos dan Informatika (JPPI)** adalah jurnal ilmiah yang menjadi media publikasi karya tulis ilmiah mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perposan, komunikasi, dan informatika. Terbit pertama kali tahun 2011 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan September dan Desember. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta menjadi wadah tukar pikiran bagi peneliti, akademisi, dan praktisi khususnya dalam bidang perposan, komunikasi, dan informatika. Redaksi Jurnal Penelitian Pos dan Informatika menerima sumbangan tulisan ilmiah dalam bidang perposan, komunikasi, dan informatika berupa hasil penelitian maupun tinjauan teori atau karya ilmiah lain (analisis empirik dan studi kasus) yang bersifat asli dan belum pernah dipublikasikan di media lain.

---



DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	v
Prototipe Set Top Box (STB) menggunakan Development Board A10 untuk Televisi Standar DVB-T2 Berbasis Android <i>Yuyu Wahyu, Yudi Yuliyus Maulana dan Folin Oktafiani</i>	87-95
Komodifikasi Pengguna Layanan Mesin Pencari dan Media Sosial di Internet (Privasi Pengguna dan Kebebasan Berekspresi sebagai Komoditas) <i>Dadang Rahmat Hidayat dan Adi Wibowo Octavianto</i>	97-105
Sistem Pembinaan Desa Informasi dalam Layanan Akses Informasi Masyarakat (Kasus Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara) <i>Heru Pudjo Buntoro dan Atjih Ratnawati</i>	107-123
Perlindungan Konsumen oleh Pelaku Usaha Online dalam Proses Transaksi di DKI Jakarta <i>Vidyantina Heppy Anandhita</i>	125-135
Persepsi Masyarakat atas Pemanfaatan TIK pada Layanan Pos di Kantor Pos Cianjur <i>Syaidah</i>	137-149
Analisis Kebutuhan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) pada Implementasi Program Universal Service Obligation (USO): Studi Kasus Implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) <i>Anton Susanto</i>	151-165
KETENTUAN PENULISAN NASKAH	167



## PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya maka Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Puslitbang PPI) dapat menerbitkan Jurnal Penelitian Pos dan Informatika (JPPI) Volume 4 No. 2 Edisi Desember tahun 2014 dengan tetap komitmen untuk meningkatkan kualitas jurnal yang lebih baik. Pada volume 4 edisi Desember 2014 ini, tim redaksi JPPI berupaya memuat beberapa tulisan hasil penelitian mengenai bidang pos dan bidang informatika, namun ada juga tulisan yang bersumber pada hasil telaah terhadap penyiaran.

Dalam bidang penyiaran, disajikan tulisan hasil riset yang dilakukan oleh **Yuyu Wahyu , Yudi Yuliyus Maulana dan Folin Oktafiani**, Peneliti Pusat Penelitian Informatika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berjudul “**Prototipe Set Top Box (Stb) Menggunakan Development Board A10 Untuk Televisi Standar DVB-T2 Berbasis Android**”. Penelitian ini bertujuan untuk mereferensikan STB murah dengan *Reference design Hardware* yang menjadi cetak biru produksi oleh pihak industri dan *Reference design Software* yang *light-weight*.

Artikel terkait bidang Komunikasi adalah “**Komodifikasi Pengguna Layanan Mesin Pencari Dan Media Sosial Di Internet**” oleh Dadang Rahmat Hidayat dan Adi Wibowo Octavianto Peneliti Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Tulisan ilmiah ini mencoba menunjukkan bahwa para kapitalis layanan online dengan dibantu media-media konvensional, mempromosikan trend untuk menggunakan kebebasan berekspresi, terkoneksi, dan berbagi dengan orang lain melalui layanan-layanan online.

Selanjutnya artikel terkait bidang Informatika adalah “**Sistem Pembinaan Desa Informasi Dalam Layanan Akses Informasi Masyarakat**” oleh **Heru Pudjiobuntoro dan Atjih Ratnawati**, Peneliti Madya bidang Studi Komunikasi dan Media pada Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan tentang pola pembinaan desa informasi sebagai salah satu bentuk pengembangan desa di daerah perbatasan serta melaporkan temuan yang dilakukan terhadap “Desa Informasi”, yang direncanakan dan dibangun pemerintah di Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dimana studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban perlindungan konsumen yang dilakukan pelaku usaha online di DKI Jakarta, maka disajikan hasil penelitian oleh **Vidyantina Heppy Anandhita** , Peneliti Pertama dari Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil menunjukkan bahwa sepertiga responden melanggar PP PSTE tahun 2012 pasal 49 dan berpotensi merugikan konsumen yang melakukan transaksi online.

Artikel mengenai pos yaitu **Persepsi Masyarakat atas Pemanfaatan Tik Pada Layanan Pos Di Kantor Pos Cianjur**, yang dilakukan oleh Syaidah Peneliti Muda dari *Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung* Kementerian Kominfo. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pemahaman, sikap, penilaian dan persepsi terhadap layanan jasa terhadap layanan PT.Pos Indonesia dengan sample penelitian masyarakat pengguna jasa layanan PT. Pos Indonesia yang berjumlah 30 orang di Kabupaten Cianjur

Selain itu, kami pun menyajikan artikel mengenai Analisis Kebutuhan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) Pada Implementasi Program Universal Service Obligation (USO) oleh **Anton Susanto** Peneliti Pertama dari Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan data primer hasil FGD ini menunjukkan hasil adanya kebutuhan terhadap tata kelola TI dalam implementasi USO secara umum, baik itu membangun kembali hubungan *stakeholder* terkait dengan penyelesaian backlog pembayaran dan masalah arbitrase, transparansi dan akuntabilitas.

Demikian sekilas kata pengantar redaksi Jurnal Penelitian Pos dan Informatika , semoga jurnal ini dapat bermanfaat menambah wawasan dan informasi dalam bidang perposan, komunikasi, penyiaran dan informatika. Kami berharap saran dan kritik yang membangun demi kemajuan JPPI ke depannya.

Terima kasih.

Jakarta, Desember 2014

REDAKSI

# SISTEM PEMBINAAN DESA INFORMASI DALAM LAYANAN AKSES INFORMASI MASYARAKAT

(Kasus Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin,  
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara)

## *MANAGERIAL SYSTEM OF INFORMATION VILLAGE IN SUPPLY OF INFORMATION ACCESS TO SOCIETY*

*(Case of Information Village at Pasar VI Kualanamu Village, Distric of Beringin,  
Deli Serdang Regency, Province of North Sumatera)*

**Heru Pudjo Buntoro<sup>1</sup> dan Atjih Ratnawati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>dan<sup>2</sup>Pusat Litbang Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan  
Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, Indonesia

<sup>1</sup>herubuntoro@yahoo.com. dan <sup>2</sup>Aci\_ratnawati@yahoo.co.id.

Naskah diterima : 28 Oktober 2014; Direvisi : 2 Desember 2014; Disetujui : 19 Desember 2014

---

### **Abstrak**

Tulisan ini melaporkan temuan sebuah studi yang dilakukan terhadap “Desa Informasi”, yang direncanakan dan dibangun pemerintah di Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dalam studi kasus ini data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Desa Informasi. Selain itu dilakukan pula pengamatan langsung terhadap operasional Desa Informasi di lapangan, serta studi dokumen terkait. Studi ini antara lain menemukan bahwa manajemen dalam layanan informasi masyarakat Desa Pasar VI Kualanamu menghadapi kendala yaitu tidak adanya koordinasi antar unsur yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan Desa Informasi serta pengawasan kegiatan di lapangan. Oleh sebab itu perbaikan tata kelola Desa Informasi sangat diperlukan dengan melibatkan semua sumberdaya sesuai dengan perencanaan kegiatan dan pengoperasian, serta pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar.

**Kata kunci:** Sistem Pembinaan, Desa Informasi.

### **Abstract**

*This Paper reports finding of a study conducted to the management of “information village” which was planned and built by the Indonesian government in Pasar VI Kualanamu village, District of Beringin, Deli Serdang Regency, the Province of North Sumatra. The case study employed kualitative approach, where the data was collected through in-depth interviews. Beside direct observation was conducted on the activities and condition of information village as well. Some examination of documents, and archival footage were also conducted to complete the data. The most important finding shows that the management faced some barriers, primarily there were no coordination and control to elements involved in the operation of the information village. That is why the condition needed to be improved primarily by infolving all resources in accordance with the right and good management principles, eq. planning, coordination, operation as well as controlling.*

**Keywords:** Managerial System, Information Village.

## PENDAHULUAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (selanjutnya disingkat Kemkominfo) memiliki peran dalam mewujudkan "Masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Sumber: Kemkominfo RI). Dalam mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kominfo berusaha untuk melayani dan memfasilitasi serta melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan memajukan layanan informasi bagi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbudaya informasi. Saat ini masih ditemukan fakta di lapangan tentang adanya kesenjangan antara daerah perdesaan yang letaknya jauh terpencil di pedalaman atau yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Timor Leste, Papua New Guinea dan Malaysia dengan daerah perkotaan. Kondisi kurangnya sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi pemerintah. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan jalur transportasi yang masih sangat sulit dirasakan masyarakat, yang kesemuanya ini berakar pada masalah kemiskinan dan keterbelakangan bangsa.

Salah satu faktor penyebab adanya keterbelakangan tersebut ialah kurangnya memperoleh sentuhan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan tetangganya yang tinggal di desa-desa lain yang lebih dekat dengan ibukota provinsi atau kota-kota lainnya. Misalnya bagi mereka yang tinggal di daerah kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, menghadapi persaingan yang sangat berat karena berdekatan dengan negara tetangga yang sudah sangat maju infrastrukturnya. Mereka ini kurang mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan dengan infrastruktur yang sangat terbatas, sehingga secara ekonomi menjadi tergantung pada negara tetangganya. Oleh sebab itu tidak heran bila pada waktu-waktu tertentu mereka berbondong-bondong menyeberang perbatasan untuk menjual hasil pertanian mereka demi mendapatkan ringgit Malaysia. Demikian pula orangtua dan anak-anak mereka lebih

suka sekolah di Malaysia yang gratis, terjamin dan lebih maju pelajarannya dari pada bersusah payah sekolah di desa mereka sendiri dengan kondisi yang seadanya. Belum lagi masalah peluberan informasi yang berasal dari negara tetangganya. Adanya dominasi pemberitaan yang berasal dari media asing tersebut, menjadikan masyarakat di daerah perbatasan lebih "melek" informasi dari pada negara sendiri. Adalah kenyataan bahwa di daerah perbatasan mereka lebih mudah mengakses berita dari negara tetangga, dari pada negara sendiri. Informasi penyeimbang dari dalam negeri dikatakan masih sangat kurang bahkan hampir tidak ada sama sekali, hal inilah yang dikhawatirkan dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat setempat serta memperlemah wawasan kebangsaan nasional.

Lebih lanjut hal demikian jika dibiarkan dapat memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, seperti menurunnya rasa patriotisme. Ketiadaan informasi dari sumber dalam negeri menyebabkan pengetahuan mereka terhadap pemerintahan dan penyelenggaraan negara sangat sempit, sehingga kemauan untuk berpartisipasi terhadap proses politik menjadi sangat rendah. Amandemen UUD 1945 pasal 28 F menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Kementerian Kominfo, 2009). Oleh sebab itu pemerintah merasa berkewajiban untuk memfasilitasi dan menyediakan informasi yang adil dan merata bagi masyarakat yang tinggal diseluruh pelosok tanah air.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu wujud dari pada keterbukaan itu. Salah satu upaya untuk menjembatani kesenjangan informasi pada masyarakat di daerah perbatasan serta daerah miskin dan tertinggal tersebut, pemerintah telah merencanakan dan membentuk "Desa Informasi" di beberapa daerah. Pembentukan Desa Informasi

ini merupakan keinginan Pemerintah khususnya Kementerian Kominfo RI dalam upaya mempersempit kesenjangan digital melalui pemerataan informasi dan penyediaan akses teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat di perdesaan. Karenanya pembentukan Desa Informasi yang diprioritaskan untuk daerah-daerah terpencil dan secara ekonomi tertinggal serta daerah perbatasan, seperti desa Kerom di provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, desa Silawan di provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, dan desa Bengkayang di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia adalah keputusan yang tepat.

Desa Informasi adalah program kementerian Kominfo di bidang pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi, serta pemberdayaan masyarakat. Desa Informasi merupakan integrasi dan peningkatan antara berbagai program lainnya yang telah berjalan, seperti Desa Berdering, Desa Pinter (Desa Punya Internet), Desa Radio Komunitas, serta Desa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Oleh karena itu maka salah satu syarat ditentukannya Desa Informasi adalah lokasi tersebut harus mempunyai sarana listrik dan Kelompok Informasi Masyarakat atau minimal ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) perdesaan.

Kebijakan pembentukan Desa Informasi dimulai tahun 2009 oleh kementerian Kominfo. Kemudian program prioritas nasional tersebut didukung dan diperkuat oleh instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010. Pada tanggal 11 Desember 2010 Menteri Komunikasi dan Informatika telah meresmikan sebanyak 14 desa informasi secara serentak yang dipusatkan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan tiga desa lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, serta 10 desa tersebar di Indonesia.

Hingga tahun 2011 sebanyak 84 Desa Informasi telah di resmikan di seluruh Indonesia, dan tahun

2012 diresmikan lagi sebanyak 100 Desa Informasi, sehingga jumlahnya menjadi 184. Dan ini akan terus diperbanyak lagi hingga tahun 2014 ini Indonesia direncanakan akan mempunyai 500 Desa Informasi (Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika). Desa-desi Informasi tersebut diharapkan nantinya akan terhubung satu sama lain.

Program desa informasi memiliki delapan unsur kegiatan, yaitu; (1) program desa berdering/desa dengan sambungan telepon, (2) Desa Pinter (desa punya internet), (3) radio komunitas, (4) pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (perbatasan), (5) media center, (6) TV penerima siaran berlangganan, (7) media pertunjukan rakyat, dan (8) M-CAP/MPLIK, yaitu fasilitas kendaraan roda empat yang di dalamnya tersedia fasilitas internet, telepon, faximile, DVD player dan TV LCD (*Voice of America*. (2014). Minggu, 19 Januari).

Dengan adanya Desa Informasi ini diharapkan masyarakat dapat a. Mempercepat pengurangan kesenjangan informasi, b. Mendorong terciptanya ekonomi kreatif bagi masyarakat, c. Terselenggaranya siaran radio komunitas, yang mengadopsi konten lokal di wilayah perbatasan, d. Terselenggaranya kelompok informasi masyarakat wilayah perbatasan, sebagai ajang komunikasi masyarakat perbatasan, e. Terpasangnya sambungan tilpun wilayah perbatasan di desa kecamatan wilayah perbatasan sebagai sarana komunikasi warga masyarakat, f. Terselenggaranya PLIK/MPLIK di wilayah perbatasan/jaringan internet, g. Dan tersedianya Televisi Berlangganan di komunitas masyarakat perbatasan (<http://www.antaranews.com/>). Oleh karena itu Desa Informasi dirancang agar masyarakat perdesaan di daerah perbatasan dan daerah terpencil di Indonesia tidak lagi terkebelakang, mereka akan menjadi lebih pintar dan melek teknologi sehingga kesenjangan dengan tetangganya yang lain dapat dihapuskan. Selanjutnya pengetahuan dan ketrampilan mereka diharapkan dapat memicu peningkatan produktivitas kerja masyarakat setempat dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup mereka serta memupuk rasa cinta tanah air.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara dan beberapa kalangan pengusaha telah berencana menjadikan Sumatera Utara sebagai “provinsi internet” (*cyber province*). Dengan program pemanfaatan fungsi internet tersebut, diharapkan Sumut yang memiliki berbagai sumber daya dan potensi yang melimpah dapat semakin berkembang (<http://www.antaranews.com>) Mungkin karena itulah meskipun bukan daerah perbatasan maka pada tanggal 13 Desember 2013, Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara telah diresmikan oleh Menteri Koinfo sebagai Desa Informasi yang ke 152, yang ditandai dengan penyerahan perangkat Indovision yang dilengkapi 25 channel dan televisi LED 32 inci oleh PT MNC SkyVision Tbk (MKSY). Selain itu Desa Pasar VI Kualanamu tersebut telah memiliki persyaratan yang mendukung kemudahan bagi masyarakat dalam komunikasi dan mendapatkan informasi. Menurut Tifatul Sembiring ada delapan titik di Sumatera Utara telah terjaring dalam desa informasi itu, salah satunya Desa Pasar VI. Meski letaknya dekat dengan Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) dan masih dekat perkotaan, namun desa ini bisa terpilih karena sudah melalui tahapan, seperti peninjauan dan komunikasi. (2013, 14 Desember).

Desa Informasi merupakan salah satu program *Universal Service Obligation* (USO) yang dibiayai melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Desa Informasi merupakan program yang bernilai strategis di bidang telekomunikasi yang bertujuan mempercepat akselerasi pembangunan daerah-daerah perbatasan yang terpencil dan tertinggal di Indonesia sebagai salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Program inipun bertujuan antara lain pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, meminimalisir kesenjangan informasi di segala bidang, dan terciptanya koneksi antara masyarakat, pemerintah, pengusaha serta antara semua pihak yang terkait secara timbal balik.

Aplikasi teknologi informasi akan menunjang aktivitas maupun segala potensi yang ada di masing-masing daerah, termasuk di bidang sosial dan budaya. Adanya kelompok informasi masyarakat, organisasi-organisasi komunitas yang telah dilengkapi sarana komunikasi dan informatika diharapkan tumbuh kreativitasnya. Informasi-informasi yang relevan dapat diolah dalam berbagai konteks sesuai kepentingan atau kebutuhan untuk selanjutnya dikemas menjadi sebuah *knowledge* yang dapat diakses seluruh warga sekitar. (Martono, Djoko, 2011).

Penelitian mengenai Desa Informasi sudah pernah dilakukan oleh para peneliti dari Pusat Litbang APTIKA IKP, Badan Litbang SDM, di Desa Silawan, Kota Atambua Kabupaten Belu, provinsi Nusa Tenggara Timur dan Desa Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian tersebut mereka mendapati ternyata Desa Informasi yang telah diresmikan kurang berhasil bahkan ada yang menemui kegagalan beroperasi. Sedangkan Desa Informasi di desa Pasar VI Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara belum pernah diteliti, oleh sebab itu maka studi ini dilakukan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana sebenarnya pola pembinaan Desa Informasi dilakukan dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian masyarakat informasi yang sejahtera dan bertanggung jawab di wilayah perbatasan. Masalah utama yang ingin diketahui dalam studi ini ialah bagaimana seharusnya pola pembinaan desa informasi dilakukan oleh pemerintah sehingga desa informasi ini dapat melakukan kegiatannya dengan baik. Hal ini meliputi perencanaan kegiatan dan pendayagunaan sumberdaya informasi di desa tersebut, bagaimana mereka melakukan kegiatannya di lapangan dan bagaimana mereka melakukan pengendalian/pengawasan terhadap Desa Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pola pembinaan desa informasi sebagai salah satu bentuk pengembangan desa di daerah perbatasan.

## LANDASAN TEORI

Seminar hasil penelitian tentang Desa Informasi yang diselenggarakan oleh Pusat Litbang Aptika IKP tahun 2013 antara lain menyebutkan bahwa mengenai Desa Informasi ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Dalam laporan utamanya yang dimuat di *Mediakom*; Vol.6, April 2012 dengan judul “Desa Informasi: Sebuah pertarungan dan Realitas”, S. Arifianto antara lain menyatakan bahwa kegagalan pembentukan Desa Informasi di Indonesia yang dilakukan pemerintah, sebagian besar diasumsikan adanya faktor ketidak siapan masyarakat. Untuk mengimplementasikan indikator minimal sebuah desa informasi bukan sekedar terbantunya peralatan kepada pelaku, tetapi lebih ditekankan pada kesiapan dari masyarakat akan kebutuhan sebuah desa informasi. (2012, Vol. 6/April). Jadi dapat diasumsikan bahwa Desa Informasi tersebut sebenarnya telah gagal berfungsi. Penyebab gagalnya Desa Informasi antara lain ialah faktor budaya masyarakat setempat yang belum siap menerima teknologi tersebut.

Djoko Waluyo dan Kanti Wilujeng juga dari Pusat Litbang Aptika IKP dalam laporan Penelitiannya mengenai desa informasi yang dilakukan juga pada tahun 2013 di Desa Silawan, Atambua, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur, antara lain menyebutkan bahwa penetapan desa Silawan yang terletak persis dengan daerah perbatasan R.I. dengan Timor Leste sebagai desa informasi sangat tepat. Perangkat komputer yang dilengkapi dengan akses internet, radio komunitas, TV berlangganan, KIMTAS, telah mendorong kegiatan masyarakat untuk mencari informasi melalui jaringan internet, menonton TV dan berdiskusi dalam kegiatan KIMTAS atau Komunikasi sosial desa. Namun sayang pemeliharaan perangkat yang telah disediakan tersebut kurang maksimal, sehingga pada akhirnya hampir semua perangkat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kendala teknis ini sangat menghambat pengembangan desa informasi. (2013, ).

S. Bayu Wahyono dalam artikelnya tentang “Optimalisasi Program Desa Informasi Melalui

Penguatan Kelembagaan” yang dimuat di *Jurnal Penelitian IPTEK-KOM*, Volume 13, No. 2, Desember 2011, antara lain menyebutkan bahwa program desa informasi belum mencapai hasil yang optimal. Faktor penyebabnya, program itu dilaksanakan dengan determinisme teknologi dan cenderung mengabaikan determinisme sosial budaya. Aspek kelembagaan desa informasi yang mestinya berperan dalam pengelolaan selanjutnya kurang mendapat perhatian. Selanjutnya Bayu menyarankan agar program desa informasi perlu terus dilanjutkan dan dikembangkan. Konsep pengelolaan dan pengembangan desa informasi perlu mempertimbangkan asumsi determinisme sosial yang memiliki karakter *bottom-up*. (2011, *Jurnal IPTEKKOM*, Vol. 13, No. 2, Desember)

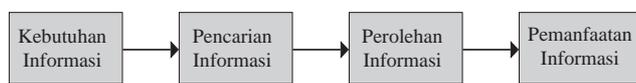
Dari ketiga hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada desa informasi yang gagal beroperasi, ada pula desa informasi yang kurang perawatan teknisnya, sehingga tidak bisa berjalan dengan semestinya dan ada pula yang menemukan perlunya penguatan kelembagaan desa informasi di daerah. Dan kegiatan desa informasi hendaknya mempunyai karakter *bottom-up*.

Salah satu faktor yang perlu dilihat dari aktivitas desa informasi ini adalah bagaimana pemerintah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan desa informasi ini kepada masyarakat. Siapa yang harus membina seluruh unsur yang terlibat dalam aktivitas desa informasi tersebut. Dan bagaimana pembagian kerjanya di daerah, karena itu melibatkan beberapa unsur yang bersifat otonom.

Dengan adanya desa informasi yang dibangun di berbagai tempat di Indonesia diharapkan mampu menjadi stimulan bagi masyarakat di desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya. Selama ini mereka ibarat warga yang kurang aktif menyikapi persoalan yang terjadi di desanya. Pada hakekatnya setiap manusia mempunyai aktivitas untuk memenuhi naluri keingintahuannya. Akan tetapi ketiadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di desanya menyebabkan mereka pasif dan tidak

mungkin melakukan itu. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di desa mereka, terutama dengan kehadiran TIK, diharapkan dapat mendorong mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan internet, atau TV, atau melalui tilpun mereka kini bisa menghubungi teman-teman atau sanak saudaranya di luar desa dan bergerak mencari informasi tentang aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang ada di sekitarnya.

Kebutuhan masyarakat akan informasi mendorong berperilaku mencari informasi. Perilaku masyarakat dalam pencarian informasi tersebut tercermin dalam bentuk pencarian informasi secara aktif. Setelah mendapatkan informasi maka timbul gagasan untuk memanfaatkan informasi sesuai dengan perannya masing-masing dalam suatu sistim sosial (lihat Gambar: 1).



**Gambar 1:** Proses perolehan informasi

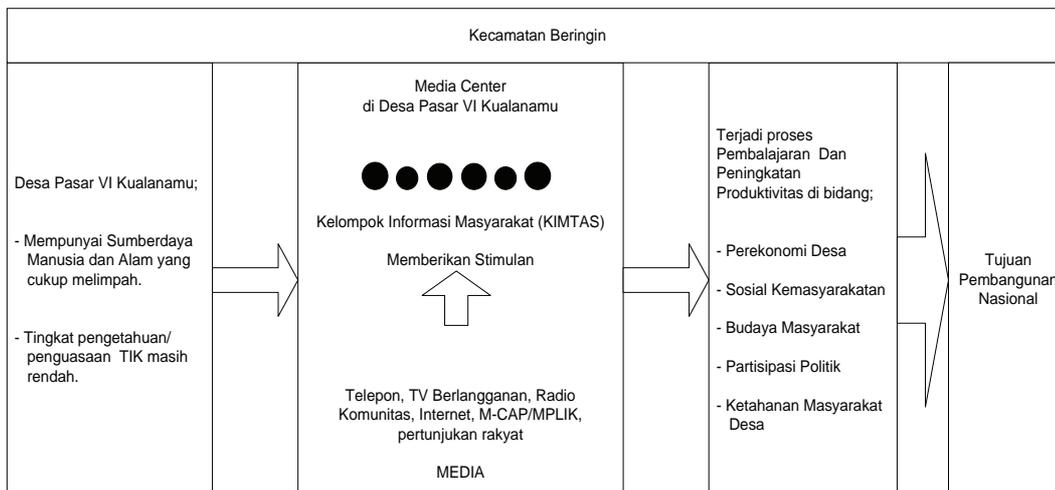
Desa Informasi dinilai bermanfaat bagi masyarakat bila layanan informasi tersebut memberikan pesan-pesan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat, menambah dan memberdayakan kemampuan bersaing bagi masyarakat, merangsang timbulnya kreasi-kreasi baru dalam aktivitas kehidupan, serta mampu memberikan inspirasi bagi masyarakat

Hal ini dapat diketahui dari asumsi, harapan, maupun pengetahuan seseorang tentang teknologi informasi tersebut. Dan Desa Informasi baru dianggap bermanfaat apabila dibina dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pembinaan yang baik pula.

Dengan hadirnya program desa informasi maka roda pembangunan di desa itu akan berputar, sehingga sektor pariwisata, pertanian, perekonomian dan pendidikan akan ikut terangkat pula dan akhirnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil di pelosok tanah air secara langsung atau tidak

langsung akan ikut meningkat. Masyarakat di Desa Pasar VI Kualanamu, kecamatan Beringin tersebut diasumsikan mempunyai potensi berupa sumberdaya manusia dan alam yang cukup melimpah akan tetapi masih berada dalam kondisi yang kurang atau tidak menguasai teknologi informasi. Dalam ranah publik sudah seharusnya masyarakat mempunyai kebebasan untuk memperoleh informasi. Dalam kaitan ini media massa dan internet mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan ide-ide baru serta inspirasi bagi masyarakat sebagaimana terlihat pada Gambar: 2 di bawah.

Beroperasinya Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sebagai bagian dari kegiatan layanan informasi masyarakat merupakan stimulan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi melalui internet memberikan kesempatan pada masyarakat untuk tidak hanya mengenal ide-ide baru, tetapi juga untuk saling berinteraksi satu sama lain melalui kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat Daerah Perbatasan (KIMTas), membahas masalah bersama dan membangun kesepakatan-kesepakatan baru. Materi yang disajikan oleh fasilitas internet yang disediakan oleh pemerintah bermanfaat untuk menjadi bahan diskusi kelompoknya. Hasil diskusi tersebut bisa memperkaya pengetahuan ataupun meluruskan persepsi yang salah tentang dunia pendidikan, perekonomian, kesehatan, kebudayaan, bahkan tentang negaranya sendiri. Wawasan mereka tentang hidup berbangsa dan bernegara bisa bertambah. Internet merupakan tempat dimana orang dari berbagai suku, dan bangsa saling berdiskusi, mempertemukan ide-ide, paham, pemikiran, dan sebagainya. Prof. Suhono Supangkat dari Dewan TIK Nasional pernah menyatakan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bisa menjadi alat pengungkit daya saing bangsa. Selain itu konsep INSAN (Internet Sehat) dan TIK bisa juga digunakan di segala aspek seperti tata kelola pemerintahan yang baik, perizinan, hingga pendidikan. (2014, 3 Juli)

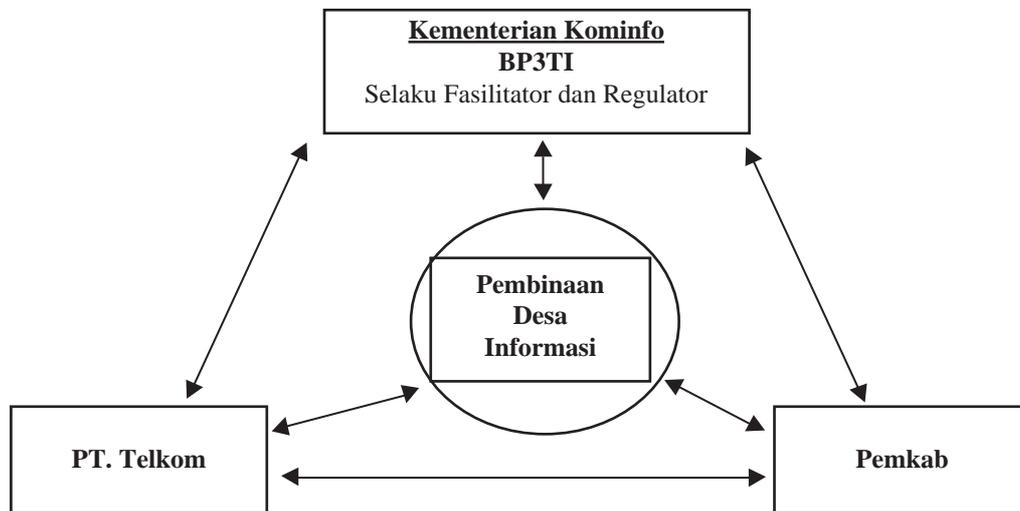


**Gambar 2:** Mekanisme Kerja Desa Informasi

Dalam negara demokrasi masyarakat hidup dan tinggal dalam ranah publik. Konsep ranah publik di sini bersifat abstrak, dimana orang-orang yang tinggal di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain. Dimana masyarakat mempunyai kebebasan untuk saling mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan orang banyak. Jadi diskusi tersebut bersifat horizontal tidak ada intervensi atau pun dominasi dari penguasa. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Dan Informatika berperan dalam menyediakan sumberdaya berupa siaran radio komunitas, siaran televisi berlangganan, telepon, internet dan MPLIK, ditambah dengan media pertunjukkan rakyat, serta media center tempat dimana anggota Kelompok Informasi Masyarakat daerah perbatasan (KIMTAS) dapat saling bertukar pikiran di dalamnya tentang aspek-aspek penting pembangunan di desa tersebut.

Dengan mengakses informasi dari luar desanya masyarakat akan dapat menambah pengetahuan serta ketrampilannya dalam mengelola ekonomi rumah tangganya. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadjono & Sari bahwa komponen penting pemberdayaan masyarakat menuju konsep masyarakat informasi adalah Mengenal Desa Sendiri (MDS) untuk memetakan kondisi sekarang, tujuan, dan faktor pendukung sebagai landasan perencanaan kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sarana M-CAP. (2012, hal: 3). Fungsi M-CAP ini sebenarnya sekarang sama dengan MPLIK.

Desa Informasi itu sendiri tentunya baru bisa berhasil mengangkat dan mensejahterakan masyarakat bila disertai engan pola pembinaan yang baik. Dengan manajemen yang baik dan sarana pendukung yang baik serta penyusunan program yang tepat maka tujuan pembentukan desa informasi tersebut dapat berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Disini ada 3 (tiga) komponen utama yang mempunyai peran penting dalam pembinaan desa informasi di daerah yaitu Kementerian Kominfo, Pemerintah Kabupaten (Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten), dan PT. Telekom. Ketiga komponen tersebut seharusnya saling bersinergi dan berinteraksi sebagai tertera dalam gambar: 3 di bawah. Berdasarkan UU no. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Dan Informatika mengeluarkan regulasi peraturan Menteri Kominfo No. R/M.KOMINFO/1219/PE /2010, tentang perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 48/PER/M.KOMINFO/11/2009, tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala BP3TI no. 1/PER/BP3TI/KOMINFO/12/2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas M-PLIK. Berdasarkan peraturan tersebut BP3TI mengeluarkan aturan kebijakan Kerjasama (Surat Perjanjian Kontrak antara BP3TI dengan penyedia Jasa MPLIK). Selanjutnya Penyedia MPLIK, melaksanakan penyediaan jasa layanan internet sesuai dengan isi



Gambar 3 Pola Pembinaan Desa Informasi

kontrak. Sedangkan penanggung jawab dan pengelola di lapangan melaksanakan tatakelola dan tanggung jawab terhadap layanan MPLIK di wilayahnya.

Akses internet adalah kunci menuju era informasi tanpa batas. Program Desa Pinter tidak hanya memajukan kehidupan masyarakat di pedesaan namun juga diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, untuk optimalisasi penggunaan internet, Telkomsel bersama pemerintah juga memberikan program edukasi yang berkesinambungan dengan mengusung konsep INSAN (Internet Sehat dan Aman) (<http://www.telkomsel.com/>). *Head of Corporate Communication Division Telkomsel*, Ricardo Indra mengatakan Telkomsel mendapat kepercayaan dapat membawa layanan Internet Paling Indonesia melalui program Desa PINTER bagi masyarakat Indonesia. Seperti misalnya, memberikan pengalaman pertama menggunakan internet untuk memperoleh informasi penting yang pada akhirnya dapat membuka akses seluas-luasnya terhadap berbagai pengetahuan agribisnis, pendidikan, bahkan inovasi terkini seputar teknologi tepatguna. (2012, 5 April).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dilakukan adalah studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang mempunyai keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan topik kajian. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait dengan penyelenggaraan Desa Informasi serta observasi di lapangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari berbagai dokumen dan bahan pustaka terkait serta internet. Pengolahan dan analisa data pada intinya dilakukan terhadap informasi baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh. Data tersebut dicari maknanya, ditelaah serta dicari keterkaitannya dengan yang lain, serta dianalisis sebab akibat dan lain-lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Desa Pasar VI Kualanamu

Desa Pasar VI Kualanamu masuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang yang menurut sejarahnya pada zaman kolonial dulu merupakan daerah kekuasaan kesultanan Deli dan Serdang. Kedua wilayah tersebut pada masa penjajahan masuk wilayah Karesidenan Sumatera Timur dan merupakan salah satu tempat pemukiman orang-orang Jawa, yang dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pekerja perkebunan di Sumatera. Hasil bumi utama yang cukup terkenal dan melimpah pada waktu itu adalah produk pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, cacao, kelapa, kopi, pinang, kemiri, dan aren. Setelah kemerdekaan kedua wilayah tersebut menjadi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan peraturan perundangan baru.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, di desa ini pengertian kata "Pasar" dalam bahasa masyarakat Kualanamu berarti "jalan". Jadi Desa Pasar VI berarti desa jalan VI. Desa Pasar VI Kualanamu termasuk dalam wilayah kecamatan Beringin, yang sebenarnya bukanlah kecamatan termiskin di Kabupaten Deli Serdang. Menurut data statistik tahun 2013, kecamatan yang paling banyak berpenduduk miskin ialah kecamatan Hamparan Perak (Jumlahnya 12.553 orang), kecamatan Percut Sei Tuan (12.423 orang), dan yang ketiga ialah Kecamatan Tanjung Morawa (10.060 orang), kemudian kecamatan beringin penduduk miskinnya berjumlah 3.734 jiwa.

Sebagai sebuah wilayah kecamatan perkembangan Kecamatan Beringin menjadi semakin penting, karena Kecamatan ini menjadi lokasi Bandar Udara Internasional Kualanamu yang luasnya mencapai 1.365 hektar dan baru saja diresmikan oleh Presiden pada tanggal 25 Juli 2013, pukul 00.01 WIB (Tribun News.com, Selasa 24 Juni 2014). Dulu lokasi perkebunan kelapa sawit ini dibagi dalam jalan 1, 2, 3-6 dan seterusnya. Desa Pasar VI Kualanamu dibagi menjadi 3 wilayah, Dusun I, II, dan III.

Menurut data dari Kantor Desa tahun 2013, Dusun I berpenduduk 278 jiwa, Dusun II berpenduduk 67 jiwa, dan Dusun III berpenduduk 362 jiwa. Jumlah seluruh penduduk Desa Pasar VI Kualanamu adalah 713 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 347 jiwa dan penduduk perempuan adalah 366 jiwa. Hampir semua penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk yang berpendidikan SD berjumlah 204 jiwa, SLTP berjumlah 267 jiwa, dan SLTA berjumlah 225 jiwa, dan yang berpendidikan SI adalah 3 jiwa. Tidak sekolah 14 jiwa. Dari data angka tersebut jelas terlihat bahwa masyarakat Desa Pasar VI Kualanamu mayoritas berpendidikan SLTP dan SLTA. Jadi memang dari sini tampak bahwa dari segi pengetahuan, masyarakat desa kualanamu masih setingkat sekolah menengah.

Desa Kualanamu merupakan pintu gerbang utama bagi arus keluar masuk penduduk di provinsi Sumatera Utara, yang juga merupakan pusat kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional maupun internasional. Dan ketika penelitian ini berlangsung, pembangunan sarana jalan di desa ini sedang giat dilaksanakan. Semua ini memungkinkan perkembangan ekonomi yang jauh lebih maju mengikuti perkembangan pembangunan Bandara Kualanamu. Sehingga Desa Pasar VI Kualanamu dapat diprediksi sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang kuat sebagai Desa maju.

Mayoritas penduduk Desa Pasar VI Kualanamu beragama Islam, di sini tidak terdapat penganut Agama lain. Jadi tempat ibadah yang ada hanyalah Masjid dan Musholla. Selain itu penduduk Desa Pasar VI Kualanamu memiliki ciri yang seragam sebagai suku Jawa yang menganut budaya serta adat istiadat Jawa. Desa Pasar VI Kualanamu adalah desa yang dekat sekali dengan arus modernisasi. Kedekatan itu mau tidak mau berimbas pada dinamika kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian masyarakat Desa Pasar VI harus melek informasi, sehingga siap mendukung keberadaan bandara, dan mampu beradaptasi dengan modernisasi yang ada.

Mata pencaharian masyarakatnya ada yang buruh Bandara sebagai penyapu atau babat rumput, (pekerja kasar), ada pula buruh perusahaan batu bata dimana mereka bekerja harian dengan pendapatan kira-kira Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu yang dibagi 12 sampai 15 orang. Jadi rata-rata mereka bisa memperoleh 10.000 rupiah sehari.

### **Komunikasi dan Informatika**

Di Kota Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang prasarana komunikasi sudah cukup memadai. Di sini siaran stasiun penyiaran televisi yang berkedudukan di Jakarta, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, dan lain-lainnya dapat diterima dengan baik. Di kota ini juga terdapat 1 stasiun Radio Pemerintah Daerah dan 3 stasiun Radio siaran swasta niaga. Di samping itu terdapat 25 Surat Kabar Harian dan 52 Surat Kabar Mingguan terbitan regional (Sumber: Dinas INFOKOM Kab. Deli Serdang) Serta 152 Warnet dan rental komputer. Di Kabupaten Deli Serdang tercatat pada tahun 2012 tercatat sebanyak 165 KIM yang masih aktif, sedangkan KIM yang tidak aktif tercatat sebanyak 127 KIM. (Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2012).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no.08/M.Kominfo/6/2010 mengatur tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Dalam permen tersebut dicantumkan bahwa KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Selain KIM diatas ada juga KIM daerah perbatasan dengan negara tetangga yang diasumsikan berada dalam masyarakat yang ekonominya kurang maju. Sedangkan Kabupaten Deli Serdang bukan daerah perbatasan juga bukan daerah tertinggal. Oleh sebab itu di sini tidak ada KIM perbatasan, demikian pula di desa Pasar VI Kualanamu tidak ditemukan adanya Kelompok Informasi Masyarakat.

### **Pelaksanaan Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu**

Di lapangan pelaksanaan Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu adalah sebagai berikut;

- a. Kelompok Informasi Masyarakat Daerah Perbatasan (KIMTas).

Di Desa Pasar VI Kualanamu keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ternyata hingga sekarang belum terwujud. apalagi Kelompok Informasi Masyarakat Daerah Perbatasan (KIMTas). Di lingkungan kecamatan Beringin ada kelompok informasi masyarakat tetapi jaraknya cukup jauh dari Desa Pasar VI, sekitar 2 – 4 km. Pada hal kelompok inilah yang diharapkan akan menjadi obyek kegiatan Desa Informasi. KIM inilah yang diharapkan bisa menggerakkan jalannya diseminasi informasi kepada masyarakat Desa tersebut. Jadi peran KIM yang diharapkan bisa mendiskusikan pesan-pesan yang diterima dari internet ternyata masih belum terwujud. Artinya informasi yang disebarkan melalui internet belum bisa didiseminasikan pada warga masyarakat. Dengan demikian maka hingga saat ini keberadaan fasilitas Desa Informasi tersebut belum membantu masyarakat setempat. Apalagi membawa pengaruh terhadap perekonomian desa.

- b. Media Center.

Media center yang tersedia di Desa Pasar VI Kualanamu tak lain hanyalah ruang pertemuan di Balai Desa tempat dimana masyarakat atau pegawai Kantor Desa biasa berkumpul. Memang kantor tersebut bisa dijadikan Media Center, tetapi tanpa kehadiran KIM siapa yang akan berdiskusi di tempat tersebut. Apalagi di desa ini jelas tidak ada KIM.

- c. Media Pertunjukan Rakyat.

Pertunjukan Rakyat adalah salah satu media yang disyaratkan dalam kegiatan Desa Informasi. Karena media ini memang dekat dengan

kehidupan warga masyarakat sehari-hari. Di Desa Pasar VI Kualanamu, yang sebagian besar warganya adalah masyarakat keturunan Jawa menyatakan mereka menyukai pertunjukan Wayang Kulit. Namun pertunjukan ini sekarang sangat jarang digelar warga. Di samping wayang kulit industri kerajinan rakyat juga tidak ada, daerah ini memang agak miskin kreativitas. Sedangkan pertunjukan keyboard (Organ Tunggal) memang ada. Masyarakat desa pasar VI Kualanamu adalah masyarakat pendatang dari Jawa yang telah tinggal secara turun temurun di tempat tersebut. Dulunya mereka adalah pekerja perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Desa Pasar VI Kualanamu yang mayoritasnya adalah orang Jawa, hanya mengenal wayang kulit sebagai pertunjukkan kesenangan mereka. Tapi dewasa ini pertunjukkan tersebut jarang ditemui.

d. Internet.

Internet adalah media yang penting dalam Desa Informasi. Melalui internet inilah masyarakat melihat berita-berita penting yang terjadi di luar desanya. Bahkan dengan internet pula masyarakat dapat saling berinteraksi dengan mitranya di dalam dan luar negeri. Tapi sayang internet tetap di Desa Pasar VI Kualanamu sudah lama tidak bisa konek. Menurut petugas kelurahan sudah sekitar 3 bulan internet tersebut terbengkalai karena ada kerusakan. Di desa ini terdapat 2 komputer merk Lenovo, 1 printer dalam keadaan rusak juga sejak diterima, 2 meja, 2 Monitor, 1 modem, 1 Box (adaptor/pemecah arus), 2 kursi (1 dalam keadaan patah kakinya). Dulu ketika masih baru peresmian internet tersebut hanya dipakai oleh anak sekolah saja, warga disini jarang pakai karena tempatnya di kantor Desa sehingga masyarakat agak segan menggunakannya. Pada hal di desa pasar VI tidak ada Warnet, adanya di kecamatan yang jaraknya cukup jauh 3 – 4 km.

e. Radio Komunitas.

Sebelum peresmian Desa Informasi hingga penelitian ini berlangsung di desa ini juga tidak terdapat Radio Komunitas. Yang ada

ialah Radio milik Pemda Deli Serdang yang menyelenggarakan siaran dari Lubuk Pakam.

f. Telepon.

Telepon yang berasal dari program Desa Dering di kantor desa dulu ada 2 buah, sekarang tinggal 1 buah. Sejak pergantian Kepala Desa yang baru, tilpun ini belum ada biayanya. Apalagi sekarang dalam keadaan tidak menyala karena PINnya yang tahu hanya kepala desa yang lama. Jadi tilpun yang ada sudah tidak berfungsi lagi.

g. TV Berlangganan.

Menurut keterangan dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika pada waktu upacara pembukaan Desa Informasi, TV berlangganan memang tersedia tetapi belum konek. Sesudah itu baru konek inilah satu-satunya fasilitas Desa Informasi yang masih hidup. Tapi sayang penempatannya yang di Balai Desa sehingga televisi tersebut jarang ditonton oleh warga masyarakat kecuali petugas dan penjaga Kantor Desa.

h. M-PLIK

MPLIK terlihat ada di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang. Di Desa Pasar VI Kualanamu sendiri tidak pernah disambangi MPLIK tersebut kecuali pada waktu acara peresmian Desa Informasi oleh Menteri Kominfo (Pejabat Dinas Kominfo Kab. Deli Serdang, 2014, Wawancara). Jadi manfaat keberadaan MPLIK di Desa Informasi Pasar VI Kualanamu memang belum ada. MPLIK tersebut tidak pernah mangkal di Desa Pasar VI Kualanamu, kecuali di kecamatan yang jaraknya sekitar 3-4 Km dari desa tersebut.

Menurut kantor Dinas Infokom Kabupaten Deli Serdang, Penetapan dan penunjukkan pelaksanaan Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu kurang berkoordinasi dengan Daerah. Pemerintah Kabupaten tidak tahu-menahu demikian pula mengenai 'pemasangan' alat-alatnya. (Pejabat Dinas Kominfo Kab. Deli Serdang, 2014, Wawancara).

**Tabel 1**  
Eksistensi Media dan Kegiatan Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu

No.	Unsur Media	Eksistensi	Kegiatan/kondisi
1.	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Tidak ada	Tidak ada
2.	Media Center	Ada (Ruang Rapat/Balai Desa)	Tidak ada
3.	Pertunjukan Rakyat	Tidak ada	Tidak ada
4.	Internet	Ada 2 buah	Rusak
5.	Radio Komunitas	Tidak ada	Tidak ada
6.	Telepon	Ada	Rusak
7.	TV Berlangganan	Ada	Baik (Dari PT MNC Sky Vision Tbk)
8.	M-PLIK	Tidak ada	Tidak ada

## Analisis

### a. Perencanaan.

Perencanaan kegiatan Desa Informasi di lapangan belum tersusun secara detail komprehensif. Perencanaan kegiatan tersebut sebaiknya dibicarakan secara terbuka antara pihak-pihak yang berperan utama dan unsur aparatur desa serta tokoh Kelompok Informasi Masyarakat setempat. Penyusunan rencana kegiatan itu perlu disesuaikan Dengan visi dan misi desa tersebut dan perkembangan kehidupan masyarakat yang berada di luar desa, sehingga keberadaan Desa Informasi tersebut dapat mendukung visi dan misi desa Pasar VI Kualanamu dan dapat meningkatkan wawasan informasi bagi warganya.

Biaya operasional Desa Informasi memang berasal dari KPU/USO yang dikelola oleh BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika (BP3TI, 2012). Masalah pembiayaan ini memang menjadi persoalan dalam setiap organisasi sosial yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas. Hal ini tentunya juga terjadi pada Desa Informasi Pasar VI Kualanamu. Selain dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pembiayaan organisasi ini sebenarnya juga bisa didukung oleh solidaritas pengelolanya

dan tokoh masyarakat serta warga desa secara swadaya.

Program Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu juga belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat setempat. Ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi program tersebut ke masyarakat ataupun anggota KIM di tingkat Kecamatan. Disamping itu organisasi pengelola yang belum terbentuk secara permanen juga menjadi kendala besar tentang hal ini. Oleh sebab itu Bayu Wahyono menyatakan diperlukan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk merancang bentuk organisasi pengelola Desa Informasi ini beserta tata kerjanya (Wahyono, Bayu, 2011)

Perencanaan kegiatan dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu belum tersusun dan terdokumentasikan dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan kegiatan dan rencana pembiayaan serta penjadwalan aktivitas bulanan Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Pasar VI Kualanamu tersebut secara lebih rinci, sehingga masyarakat benar-benar dapat memantau kegiatannya dari hari ke hari. Tetapi itu memang sulit juga mengingat kelembagaan Desa Informasi itu sendiri yang belum kuat dan

hingga kini masih mencari-cari siapa penanggung jawabnya. Akibat dari semua ini timbul persoalan fundamental dibalik penyelenggaraan Desa Informasi tersebut. Apakah penempatan Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu sudah tepat?. Mengingat desa tersebut bukan bertempat di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, juga sebenarnya bukan desa tertinggal. Seperti diketahui bahwa di desa ini tidak terdapat Kelompok Informasi Masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh seorang petugas Kantor Desa di Desa Pasar VI Kualanamu ini belum ada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM adanya di tingkat kecamatan yang berjarak sekitar 3-4 Km. dari Desa Pasar VI Kualanamu. (Kepala Urusan Pembangunan, Mei 2014, Wawancara). Dengan demikian maka tujuan diadakannya Desa Informasi untuk menopang kinerja KIM jadi sia-sia. Mungkinkah anggota KIM mau berjalan beberapa kilometer jaraknya ke desa lainnya untuk memperoleh informasi?.

b. Pengorganisasian.

Pendayagunaan sumberdaya operasional Desa Informasi seperti perangkat Tilpun, Televisi Berlangganan, perangkat Internet, MPLIK, dan Pertunjukan Rakyat, itu tergantung sepenuhnya pada orang yang diberikan kewenangan sebagai Koordinator di tingkat Desa. Apabila koordinator tersebut paham akan tugas-tugasnya, dan tahu betul tanggung jawabnya maka tugas itu bisa di jalankan dengan baik. Oleh sebab itu penunjukkan koordinator, masalah kelembagaan, dan pembuatan *Standard Operating Procedures* (SOP) Desa Informasi sangat penting untuk segera dituntaskan. Jangan sampai semuanya berjalan tanpa solusi sehingga menghambat kinerja Desa Informasi itu sendiri.

Unsur Pemda Kabupaten Deli Serdang seyogyanya dilibatkan, karena Desa Pasar VI Kualanamu masuk di wilayah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Sangat disayangkan bila justru unsur Pemda setempat tidak tahu-menahu tentang baik keberadaan maupun kegiatan Desa Informasi di wilayahnya.

Seharusnya Desa Informasi ini bisa jalan dengan dukungan sepenuhnya dan inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, melalui Dinas Kominfo bersama dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Sebab bagaimanapun ide pembentukan Desa Informasi itu sangat mulia dan baik bagi pemberdayaan masyarakat Desa terpencil, tertinggal, dan daerah perbatasan demi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Oleh sebab itu keberadaan Desa tersebut perlu didukung oleh semua pihak dan sosialisasikan pada masyarakat luas.

c. Pelaksanaan.

Sebagaimana terbaca pada Tabel: I di atas, semua peralatan telepon, komputer, dan lain sebagainya boleh dikatakan tidak bekerja, kecuali Televisi berlangganan yang masih bisa menyala, namun proses pekerjaan tersebut belum didukung oleh suatu sinergi yang optimal. Artinya masing-masing penonton TV masih menonton sendiri-sendiri. Artinya tidak diorganisir oleh pimpinan KIM. Jadi sama seperti menonton TV di rumah, tidak ada yang memotivasi dan tidak mempunyai tujuan tertentu kecuali mencari hiburan semata. Agar semuanya berlangsung lebih baik dan efektif, seorang pakar memberikan saran ke depan melalui dukungan Kementerian Kominfo perlu diadakan pelatihan Pengelolaan Desa Informasi. Keluaran dari pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan sinergi dari masing-masing pihak terhadap keberhasilan program ini. Misalnya informasi yang di dapat dari internet yang bersifat positif dapat mendorong dinamika pembangunan masyarakat, dapat disosialisasikan melalui Radio Komunitas. (Drs. H. Syafrin MA., Mei 2014, Wawancara).

Masyarakat secara umum menganggap penting adanya program Desa Informasi di desa mereka, walaupun mereka belum paham itu untuk apa. Terutama mereka yang berada di usia produktif dan anak sekolah yang telah mendapatkan pelajaran tentang komputer di Sekolah. Pemanfaatan fasilitas Desa Informasi pada

awalnya dilakukan oleh beberapa anak-anak sekolah yang biasa main disekitar Kantor Desa. Namun pemanfaatan fasilitas masih terbatas sebagai sarana hiburan saja atau keperluan sekolah. Jadi menurut kacamata akademik Fasilitas Desa Informasi belum berpengaruh terhadap perekonomian khususnya industri kreatif. Hal ini disebabkan informasi yang berasal dari luar yang berkaitan dengan industri kreatif belum berjalan sosialisasinya. (Drs. H. Syafrin MA., Mei 2014, Wawancara).

Pemanfaatan fasilitas Desa Informasi belum dimobilisasi pada warga sama sekali. Mereka yang telah dapat mengakses informasi, belum mendiseminasikan kepada warga masyarakat lainnya. Dengan demikian belum didapat tolok ukur apakah keberadaan fasilitas Desa Informasi tersebut mempermudah dan membantu masyarakat dalam mencari solusi yang dihadapinya. Sementara itu Peran Kelompok Informasi Masyarakat belum berjalan secara optimal, karena memang tidak ada eksistensinya. Untuk mendorong tumbuhnya peran ini, maka perlu diadakan sosialisasi diantara Kelompok Informasi Masyarakat yang telah ada di tingkat kecamatan. Dengan demikian pemahaman fungsi dan peran Kelompok Informasi Masyarakat menjadi semakin jelas.

Untuk mengelola Desa Informasi diperlukan keseriusan, ketekunan, dan kesabaran seorang pimpinan. Untuk itu dibutuhkan orang yang peka terhadap persoalan ekonomi para petani dan pengrajin di wilayahnya. Hal ini memerlukan kemampuan pendekatan psikologis kepada masyarakat. Sayangnya perkebunan kelapa sawit di desa Pasar VI Kualanamu telah tergusur lahannya oleh pembangunan Bandara Internasional Kualanamu dan pembangunan perumahan penduduk. Pengrajin di desa ini juga tidak ada, yang ada adalah pabrik batu bata untuk bangunan. Jadi sebagian masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai buruh di bandara dan pabrik bata serta sedikit petani. Sebenarnya program internet dan Televisi berlangganan

di Desa Informasi ini cukup bermanfaat bagi masyarakat setempat bila ditempatkan diwilayah *Public area*. Namun sangat disayangkan fasilitas yang disediakan di Desa Informasi tersebut di samping tidak berfungsi juga kurang termanfaatkan dengan baik karena lokasinya di Kantor.

Untuk itu maka konsep pembentukan Desa Informasi oleh pemerintah hendaknya lebih rasional, dan terencana dengan baik dengan memikirkan bentuk kelembagaan serta tatakerjanya, sehingga program Desa Informasi tersebut tepat sasaran. Untuk itu hendaknya ke depan perlu ditentukan kriteria yang dipersyaratkan bagi tempat-tempat yang benar-benar akan dibangun fasilitas Desa Informasi, jangan hanya berdasarkan keinginan pribadi individu saja sehingga kurang mempertimbangkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut daerah, akan selalu melibatkan Pemerintah Daerah selaku penguasa setempat. Atau antara pemberi bantuan dengan pemerintah daerah penerima bantuan, karena yang mengetahui kondisi wilayah bantuan adalah pemerintah daerah setempat. Untuk itu koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Pemda dengan Kementerian Kominfo sangat diperlukan dalam membina Desa Informasi di berbagai daerah.

Selama ini kepala Desa Pasar VI Kualanamu sama sekali belum menyosialisasikan Desa Informasi pada masyarakatnya. Mungkin karena Kepala Desa hanya merasa “menerima kehadiran” dan “ketempatan” perangkat di wilayahnya, jadi kurang paham akan langkah yang seharusnya dilakukan. Apabila tidak ada sosialisasi maka dikhawatirkan penempatan peralatan tersebut seperti Tilpun, Televisi berlangganan, dan Komputer di Kantor Desa, hanya akan dianggap masyarakat seolah-olah sebagai kelengkapan kantor Desa samata dan merupakan bagian dari kerja aparatur. Hal ini

terbukti dari hampir tidak adanya pengguna internet di kantor Desa tersebut. Selain Kepala Desa Pasar VI Kualanamu, pihak PT. Telkom pun belum pernah melakukan sosialisasi mengenai Desa Informasi tersebut kepada masyarakat.

d. Pengendalian.

Pertanggung-jawaban dalam suatu organisasi mutlak harus ada. Namun dalam pengelolaan Desa Informasi Pasar VI Kualanamu, penanggung jawab masih belum jelas berada pada siapa, kepala desa sendiri seolah tidak tahu-menahu tentang hal ini. Kedepan mengingat banyaknya tugas-tugas kepala desa, seharusnya pengelolaan Desa Informasi ini dilakukan oleh suatu susunan organisasi tersendiri yang jelas dan lugas tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian, dinamika organisasinya dapat lebih cepat berakselerasi.

Pengembangan Desa Informasi ini sebaiknya menyatu dengan pengembangan desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang pada umumnya. Visi dan Misi desa yang telah ada sebaiknya diintegrasikan dengan program Desa Informasi. Dengan demikian penyerapan informasi dari luar dan diseminasi informasi ke dalam lebih disesuaikan dengan kebutuhan desa. Sebenarnya kegiatan ini domainnya kementerian Kominfo yang perlu segera memantapkan kelembagaan Desa Informasi. Sementara Dinas Kominfo Deli Serdang yang ikut mengatur operasional MPLIK di wilayahnya ternyata merasa tidak punya tanggung jawab untuk ikut mendukung operasional Desa Informasi di Desa Pasar VI Kualanamu. Jadi tampak bahwa mereka ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik. Kegiatan Desa Informasi ini penting artinya bagi anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang sangat berkepentingan untuk melihat perkembangan ekonomi di sekitarnya.

Desa Informasi sejatinya belum berhasil mengatasi kesenjangan digital dan informasi di desa. Hal ini disebabkan karena implementasi Desa Informasi secara ideal belum bisa terwujud secara nyata. Artinya organisasi Desa Informasi

belum berjalan sebagaimana seharusnya. Disamping itu penyerapan informasi yang kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan fasilitas Desa Informasi ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Model pengendalian atau pengawasan operasional Desa Informasi hendaknya dilakukan oleh suatu organisasi tersendiri dengan melibatkan Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (KIM) sebagai Pembina. Demikian pula mengenai masalah perawatan peralatan di lapangan juga perlu mendapat perhatian. Ini penting jangan sampai belum cukup umur peralatan tersebut sudah pada rusak seperti yang terjadi di Desa Pasar VI Kualanamu ini. Masalah perawatan ini hendaknya dapat diperjelas penanggung jawabnya, siapa bertanggung jawab atas apa.

Jadi perlu ada kejelasan karena ini aset sekarang berada di kantor Balai Desa, jadi perlu diperjelas penanggung jawabnya. Dalam hal ini perlu ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak penyedia jasa. Dengan koordinasi yang baik maka perawatannya akan menjadi lebih jelas tanggung jawabnya ada di tangan siapa. Jadi aset dengan biaya besar ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi dimulai dari SOP harus ada, kemudian dilanjutkan dengan tata kelola yang menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kalau tidak ada SOP dan tata kelola yang baik maka dalam membuat rencana kegiatan pun akan mengalami kesulitan.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan Desa Informasi sebagaimana dinyatakan oleh Joko Martono, di antaranya: (1) aspek kelembagaan, yaitu perlu adanya lembaga/organisasi yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengurus proyek Desa Informasi, (2) aspek sumber daya manusia, yaitu perlunya pelatihan-pelatihan petugas dan masyarakat sekitar supaya pemanfaatan teknologi informasi semakin tepat guna, (3)

aspek pendanaan operasional, yaitu siapa yang menanggung biaya, termasuk pemeliharaan/perbaikan infrastruktur teknologi informasi di kemudian hari, (4) aspek kepemimpinan daerah, yaitu diperlukan pimpinan yang solid dalam artian “menggauli” teknologi informasi dan komunikasi sehingga paham tentang keberadaan, arti penting dan perannya untuk memajukan wilayahnya. (Joko Martono: Kompasiana, 24 April 2011).

## PENUTUP

Pembentukan Desa Informasi seharusnya disertai dengan aturan-aturan yang mengatur tentang prosedur standar operasi (SOP) atau tata kelola yang bahkan merupakan agenda pertama sebelum serah terima dilakukan sehingga masing-masing pihak memahami dan bertindak menurut aturan yang telah ditetapkan. Tanpa hal itu maka sangat memungkinkan terjadinya stagnan jalannya program Desa Informasi tersebut. Oleh sebab itu mendesak untuk segera dibuatkan rancangan kelembagaan serta regulasi pembinaannya. Pola pembinaan Desa Informasi yang benar yang mengatur tentang perencanaan kegiatan, pemberdayaan sumberdaya informasi, pelaksanaan Desa Informasi, dan pengendaliannya hendaknya perlu segera dipersiapkan. Pola pembinaan Desa Informasi adalah komitmen, aturan main, serta praktek penyelenggaraan organisasi secara sehat berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (kode etik) yang berlaku.

Pola pembinaan Desa Informasi hendaknya dilakukan secara terkoordinasi. Lembaga yang mengelola hendaknya memahami tata cara pengelolaan yang baik. Adanya penanggung jawab pengelolaan di lapangan sangat diperlukan. Oleh sebab itu solusi untuk siapa penanggung jawab diberikan perlu segera dicarikan. Kelanjutan Desa Informasi ini ke depan ada dua kemungkinan yaitu sukses mentransformasi informasi sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan, atau mati suri, seperti program pemerintah yang ada selama ini.

Namun mengingat pentingnya keberadaan Desa Informasi ini, maka alternatif pertama harus dapat terlaksana. Setelah berjalan dengan baik kelembagaan Desa Informasi ini dapat diserahkan ke kementerian lain yang memiliki perpanjangan ke desa-desa. Kementerian tersebut bisa kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan. Hal ini disebabkan kedua kementerian ini yang memiliki aparat hingga ke desa, Sehingga rentang kendali pengawasan dapat terlaksana dengan baik. (Drs. H. Syafrin MA, 2014, Wawancara mendalam).

Dari hasil penelitian tersebut selanjutnya disarankan sebagai berikut;

- a. Konsep kelembagaan Desa Informasi hendaknya segera disiapkan secara lebih matang dan dikaji secara ilmiah, termasuk *Standard Operating Procedure*nya.
- b. Pemerintah hendaknya melakukan komunikasi secara intensif dengan unsur-unsur yang terlibat dalam pembinaan Desa Informasi, terutama dengan unsur penyedia jasa maupun Pemda Kabupaten setempat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa Desa di koordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Peran koordinator kegiatan Desa Informasi menjadi sangat penting mengingat kegiatannya mencakup berbagai media. Koordinator inilah yang nantinya akan membuat perencanaan kegiatan dan pendayagunaan sumberdaya Desa Informasi yang baik, termasuk pembiayaannya.
- d. Tidak adanya sistem pengendalian kegiatan Desa Informasi yang baik menyebabkan kinerjanya kurang efektif, untuk itu Dinas Kominfo Kabupaten hendaknya bisa dilibatkan dalam memonitor pelaksanaan Desa Informasi di lapangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian ini, serta teman-teman yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini di lapangan. Akhirnya kepada Pak Lurah Desa Pasar VI Kualanamu, serta para pejabat di daerah yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuannya selama di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, (2012) *Deli Serdang Dalam Angka 2012*, Deli Serdang, Badan Pusat Statistik.

Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika, (2012), *Penyediaan KPU/USO (Melalui USO, Kita Buka Kemudahan Akses Informasi Hingga Pelosok Negeri)*, Jakarta, BP3TI.

Hardjono & Sari. (2012). Dalam *Studi Pemanfaatan Mobile CAP Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Bagi Masyarakat Di Daerah*, Jakarta, Pusat Litbang Aptika IKP.

Waluyo, Djoko & Kanti W. (2013). *Laporan Penelitian Desa Informasi di Desa Silawan, Provinsi NTT*, Jakarta, Pusat Litbang Aptika IKP.

### Dokumen :

Amandemen Undang-undang Dasar 1945. (2009). Kementerian Kominfo.

Undang-undang No: 36 Th. 1999.

Undang-Undang No: 14 Th. 2008

Undang-Undang No: 11 Th. 2008

Undang-undang No.: 6 Th. 2004.

Peraturan Pemerintah RI. No: 61 Th. 2010

Peraturan Pemerintah No: 52 Th. 2000

Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 24 Th. 2010

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 19/Per/M.KOMINFO/12/2010

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 17/PER/M.KOMINFO/2010

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 48/Per/M.KOMINFO/11/2009

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013.

Peraturan Kepala Balai P3TI, No. 01/PER/BP3TI/KOMINFO/12/2012.

### Internet :

<http://www.antaraneews.com/berita/409434/>.

Sembiring, Tifatul. (2013). Diakses dari <http://www.koran-sindo.com/Sabtu 14 Desember>.

Supangkat, Suhono. (3 Juli 2014). Diakses dari [https://id.berita.yahoo.com/ TRIBUNnews.com](https://id.berita.yahoo.com/TRIBUNnews.com).

<http://mplik.tarakankota.go.id/>.

Indra, Ricardo. (2012). Diakses dari <http://www.telkomsel.com/>, 5 April.

### Media :

*Voice of America*. (2014). Minggu, 19 Januari.

Martono, Djoko, (2011). Kompasiana, 24 April.

Wahyono, Bayu. (2012) dalam *Optimalisasi Program Desa Informasi Melalui Penguatan Kelembagaan*, Mediakom, Vol.6/April, Yogyakarta, BPPKI.

# PEDOMAN / KETENTUAN PENULISAN

## JURNAL PENELITIAN POS DAN INFORMATIKA

### I. Pedoman Umum Penulisan

Jurnal Penelitian Pos dan Informatika (JPPI) adalah jurnal yang diterbitkan secara periodik, yaitu dua kali setahun, yakni bulan September dan Desember, mengutamakan memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang memenuhi standar (kaidah-kaidah ilmiah) atau minimal layaknya penulisan karya ilmiah, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### 1. Ruang lingkup karya ilmiah/naskah

KTI yang dapat dimuat di Jurnal PPI adalah hasil penelitian, studi, analisis data sekunder, pemikiran, resensi buku baru atau tinjauan kritis teori yang berkaitan dengan pos dan informatika. Naskah juga dapat berupa resensi buku, bedah buku, dan sejenisnya di bidang komunikasi, informatika, pos, atau telekomunikasi dengan mengikuti sistematika penulisan secara umum (universal).

#### 2. Aktualitas

Aktualitas sebuah tulisan merupakan prioritas utama, yakni memuat isu-isu yang aktual, terpercaya, dan terkini atau yang sedang tren menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Karena itu, hindari penulisan yang topiknya sudah usang atau kurang mendapat perhatian masyarakat atau publik.

#### 3. Bahasa yang lugas

KTI harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD, jelas serta mudah dipahami.

#### 4. Memuat hal yang baru

KTI memuat hasil penelitian, kajian atau tinjauan teori pengembangan menghasilkan temuan baru atau inovasi bagi publik yang membacanya.

#### 5. Keaslian

KTI yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dikirimkan ke jurnal atau media lain. Hal ini untuk menghindari plagiasi dan duplikasi.

### II. Pedoman teknis penulisan

1. Format Penulisan, naskah diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1.5, dan panjang naskah 15-25 halaman kertas A4.
2. Sistematika penulisan terdiri dari :
  - a. Judul
 

Judul diketik dengan huruf kapital tebal (*bold*) dengan huruf Times New Roman Ukuran 11 maksimal 14 kata dengan rata tengah. Judul harus mencerminkan isi tulisan (memiliki keterkaitan dengan masalah dan sesuai dengan metode penelitian).

b. Nama dan Alamat Korespondensi

Nama penulis diketik lengkap di bawah judul tanpa gelar, pangkat atau jabatan diikuti lembaga afiliasi dan instansi alamat lembaga, asal negara dan *email* penulis. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.

Atjih Ratnawati<sup>1</sup> dan Dadang Rahmat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Balitbang SDM Kementerian Kominfo

Jln. Medan Merdeka Barat nomor 9, Jakarta Pusat, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

<sup>1</sup>atjihratnawati@yahoo.com <sup>2</sup>rahmat.dadang@gmail.com

c. Abstrak

Abstrak ditulis sebanyak 120-200 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) untuk bahasa Inggris berjarak satu spasi dan hanya 1 paragraf dengan huruf Times New Roman ukuran 11. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan KTI, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut : permasalahan pokok yang dibahas, alasan penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, bagaimana penelitian, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan serta pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya.

d. Kata Kunci

Kata kunci harus frase yang penting, spesifik atau representatif bagi artikel ini. Abstrak terdiri atas empat sampai enam kata ditulis di bawah abstrak. Kata kunci dalam bahasa Inggris ditulis *italic*.

e. Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian.

f. Landasan Teori

Format terbitan berkala ilmiah **tidak memuat** tulisan dengan bentuk pembaban mirip penulisan skripsi atau laporan teknis, dengan mencantumkan kerangka teori, pernyataan /perumusan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, saran dan tindak lanjut dan sejenisnya. Landasan teori dapat dimuat pada pendahuluan, metode ataupun pembahasan.

g. Metode Penelitian

Bagian ini memuat paradigma penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik olah data, dan teknik analisis.

h. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian memuat temuan dan hasil analisis dalam berbagai bentuk dan berkaitan dengan masalah.

i. Kesimpulan

Bagian ini terdiri dari simpulan dan saran (jika perlu). Simpulan ditarik dari hasil diskusi dan masalah penelitian. Kesimpulan tidak perlu diberi penomoran.

j. Ucapan Terima Kasih

Bagian ini berisi ucapan terima kasih yang ditunjukkan pada pihak-pihak yang berkontribusi baik itu lembaga, perorangan, ataupun lainnya pada tulisan ini.

k. Referensi sumber dituliskan: nama pengarang, tahun pengarang dalam halaman sumber di antara kurung.

Contoh : Penelitian di Manado menunjukkan kebanyakan masyarakat menonton televisi pada waktu siang hari, karena sore harinya banyak dimanfaatkan untuk beristirahat (Rusdi, 2004 : 26). Atau bisa juga seperti ini : Menurut Rusdi (2008), budaya menonton televisi bagi masyarakat di Kota Manado.....

l. Daftar Pustaka

Penulisan Daftar Pustaka atau rujukan di halaman terpisah dan disusun menurut abjad. Urutan penulisan nama pengarang atau penyunting judul artikel (jika bukan buku) dicetak biasa, judul majalah atau buku dicetak tebal, kota dan nama penerbit biasa disertai tahun penerbitan diletakkan di bawah nama pengarang/penyunting.

Contoh :

Rakhmat, Jalaluddin. (1991). **Metodologi Penelitian Komunikasi**. Bandung: Remadja Rosdakarya.

Atau disesuaikan dengan format APA-Style, sebagaimana terlihat dalam : <http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/>

### III. Ketentuan lainnya

1. Apabila di kemudian hari ada pemuatan ganda atas naskah yang sama maka segala resiko menjadi tanggung jawab penulis serta bersedia mengisi dan menandatangani formulir *ethical statement* dan *copyright transfer*.
2. Apabila suatu saat ada pihak atau individu yang menuntut keaslian naskah merupakan tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab Redaksi.
3. Naskah penelitian yang disponsori oleh pihak tertentu harus memuat pernyataan yang berisi informasi sponsor yang mendanai.
4. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
5. Guna menentukan naskah yang sesuai dengan Jurnal PPI, naskah akan ditelaah dan disunting oleh Dewan Redaksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
6. *Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.*
7. Setiap naskah yang diterima akan melalui proses review tertutup oleh Mitra Bestari sesuai dengan kepakarannya.
8. Setelah dalam bentuk *proof*, Penulis artikel diminta menandatangani lembar pernyataan persetujuan untuk cetak menjadi Jurnal.

9. Kepada penulis yang tulisannya dimuat di Jurnal PPI akan diberikan 2 (dua) eksemplar Jurnal sebagai tanda bukti pemuatan.
10. Pengiriman naskah disertai nama, unit kerja, alamat instansi beserta kode pos, nomor telepon, fax dan email.
  - Dikirim via Redaksi JPPI di Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Belakang, lantai 4 – Jln. Medan merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat. Telp./Fax. (021) 384 6189
  - Dikirim via email : jurnal.puslitbangppi@mail.kominfo.go.id
11. *Contact Persons* : Diah Arum Maharani : 082123734748  
Reza Bastanta Sitepu : 081315011456  
Yane Erina Marentek : 08121028131  
Romauli Simanjuntak : 08129244014